

II. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian yang dilakukan **Amaluddin (1987)** bermaksud mempermasalahkan kembali hubungan antara polarisasi ekonomi dengan polarisasi sosial di pedesaan Jawa, dan mencari kejelasan tentang dampak polarisasi ekonomi di pedesaan Jawa terhadap pembentukan kelas. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi sejauh mana polarisasi ekonomi telah membangkitkan polarisasi sosial di pedesaan Jawa, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan pelemah proses polarisasi, dan menggambarkan mekanisme polarisasi sosial tersebut.

Keeratan hubungan antara gaya hidup dan luas penguasaan tanah ternyata tidak membangkitkan pelebaran jarak sosial antar lapisan petani. Solidaritas vertikal antar lapisan petani, terutama pada tingkat dukuh relatif masih cukup kuat. Polarisasi ekonomi di desa ini tidak membangkitkan perubahan struktur sosial petani dari stratifikasi ke arah polarisasi sosial menurut garis kelas (**Amaluddin, 1987**).

Penelitian tentang pelapisan sosial juga dilakukan oleh **Kusnadi (2000)**. Penelitiannya menjelaskan bahwa intensitas tekanan sosial ekonomi dan kemiskinan membawa akibat dapat mempersulit kehidupan rumah tangga *pandhiga* di desa pesisir dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemiskinan ini disebabkan oleh faktor-faktor yang sangat kompleks. Kompleksitas permasalahan ini diperparah oleh ketidakpastian dan terus menurunnya tingkat pendapatan *pandhiga*. Salah satu faktor yang secara dominan menyumbang proses akselerasi permasalahan sosial adalah kebijakan motorisasi perahu dan modernisasi peralatan tangkap.

Rumah tangga nelayan mengembangkan strategi adaptasi untuk mengatasi tekanan sosial ekonomi yang datang setiap saat agar dapat bertahan hidup. Strategi-

strategi yang lazim dilakukan adalah memobilisasi peranan perempuan (istri) dan anak-anak untuk mencari nafkah, sementara nelayan melakukan diversifikasi pekerjaan untuk memperkuat sumber-sumber penghasilan. Strategi adaptasi ini karena berbagai faktor, sangat terbatas untuk bisa diakses oleh rumah tangga *pandhiga*. Jaringan sosial merupakan pilihan strategi adaptasi yang sangat signifikan untuk dapat mengakses sumberdaya yang makin langka bagi rumah tangga *pandhiga* di pesisir. Keberadaan bentuk jaringan vertikal pada rumah tangga mencerminkan adanya intensitas kemiskinan, kesenjangan sosial, dan ketergantungan terhadap sumber daya di kalangan rumah tangga *pandhiga* dan masyarakat nelayan di pesisir.

Pelapisan sosial dalam kehidupan masyarakat nelayan akan mudah diidentifikasi dengan mengamati pola-pola penguasaan aset produksi, seperti modal, peralatan tangkap, dan pasar. Perbedaan-perbedaan kemampuan ekonomi di antara lapisan-lapisan sosial itu diwujudkan atau ditampakkan dalam ketimpangan pemilikan barang-barang kekayaan. Beberapa rumah dibangun megah di bagian-bagian tertentu dari kampung nelayan, sementara kondisi rumah-rumah di sekitarnya adalah sebaliknya. Jenis pertama dapat diidentifikasi sebagai rumah pemilik perahu, pedagang ikan atau *pangamba*, sedangkan jenis rumah yang terakhir adalah milik *pandhiga* (Kusnadi, 2000).

Posisi seseorang dalam pemerintahan juga sangat disegani oleh masyarakat. Orang berilmu (agama), seperti *kyai* atau guru mengaji di *langgar* dan madrasah diniyah juga sangat dihormati. Pengetahuan agama yang dimilikinya dapat digunakan untuk membantu orang lain memahami ajaran agamanya atau mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi masyarakat (umat). Kedudukan sosial orang

berilmu lebih tinggi dari pada orang biasa 6 dengan penguasaan ilmu yang dimilikinya. Nelayan sering datang untuk meminta bantuannya, seperti dalam kegiatan selamatan atau pengajian (Kusnadi, 2000).

Penelitian tentang pelapisan sosial juga pernah dilakukan oleh Satria (2001), yang menjelaskan bahwa modernisasi perikanan diartikan sebagai pengembangan cara produksi kapitalis dengan teknologi lebih modern dan mutakhir. Modernisasi perikanan memang memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap peningkatan produksi, namun ternyata modernisasi juga menyebabkan formasi sosial masyarakat nelayan berubah. Cara produksi kapitalis sangat dominan terhadap cara produksi tradisional yang berakibat pada tersingkirnya cara produksi tradisional tersebut. Penelitian Satria (2001) bertujuan mengetahui pelapisan sosial yang terbentuk akibat modernisasi dan mengetahui apakah pelapisan sosial baru akibat modernisasi dapat mengarahkan terwujudnya keadilan sosial.

Stratifikasi sosial umumnya terdapat dalam setiap masyarakat. Stratifikasi sosial pada zaman dahulu didasarkan atas keturunan. Seorang keturunan bangsawan meskipun miskin dan tidak berpendidikan tetap saja stratifikasi sosialnya tinggi, sebaliknya walaupun orang kaya dan berpendidikan tinggi tetapi keturunan rakyat biasa maka stratifikasi sosialnya tetap rendah. Kemajuan teknologi dan pengetahuan saat sekarang telah menimbulkan stratifikasi sosial baru yang lazim disebut stratifikasi sosial masa kini. Stratifikasi sosial tradisional mulai kabur dan sudah berangsur hilang. Penentuan stratifikasi sosial sangat sulit karena adanya berbagai macam alasan yang dipakai untuk menilai tinggi rendahnya status sosial seseorang antara lain berdasarkan kedudukan, pendidikan dan kekayaan (Sjamsidar *dkk*, 1989).

Stratifikasi senantiasa terdapat dalam masyarakat (yaitu setiap masyarakat), yakni suatu sistem berlapis-lapis yang membagi warga-warga masyarakat dalam beberapa lapisan secara bertingkat. Suatu lapisan tertentu kedudukannya lebih tinggi dari lapisan lainnya. Masing-masing lapisan berisikan warga-warga masyarakat tertentu, dengan ukuran-ukuran tertentu pula. Kelompok warga masyarakat yang termasuk lapisan tertentu, disebut sebagai kelas sosial (Soekanto, 1987).

Sistem berlapis-lapis dalam masyarakat akan tumbuh selama dalam suatu masyarakat ada sesuatu yang dihargai, dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargainya (Soekanto, 1987). Perbedaan dan atau proses sosial yang terjadi, di dalam khazanah literatur sosiologi, dilihat sebagai perbedaan-perbedaan sosial terjemahan dari *social differentiation*. Sosiolog menjadikan perbedaan-perbedaan yang diamati tersebut sebagai dasar untuk membuat suatu kerangka stratifikasi sosial (pelapisan atau strata sosial, *social stratification*).

Sosiolog dalam upaya membuat suatu kerangka strata sosial pada umumnya pertama kali mengkategorikan perbedaan-perbedaan tersebut dan memberi tiap kategori satu label, misalnya, orang kaya, orang yang mempunyai kekuasaan, orang yang mendapatkan hak-hak istimewa, dan orang miskin (Sugihen, 1997). Kelas sosial tampak dengan berbagai macam cara. Salah satu cara ialah dengan evaluasi verbal, yaitu cara orang dalam masyarakat yang berstratifikasi, menilai anggota lain dalam masyarakat sendiri.

Kata *stratification* berasal dari *stratum* (jamaknya : *strata* yang berarti lapisan). *Social stratification* adalah pembedaan penduduk atau masyarakat dalam kelas-kelas secara bertingkat (secara hirarkis), perwujudannya adalah adanya kelas-kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah. Dasar dari inti lapisan-lapisan dalam

masyarakat adalah tidak adanya keseimbangan dalam pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban di antara anggota-anggota masyarakat (Soekanto, 1987).

Stratifikasi menurut Schoorl (1981), berarti proses atau struktur yang timbul dan di dalamnya keluarga (atau orang-orang) dibedakan antara yang satu dengan yang lain dan tersusun menjadi lapisan-lapisan yang berbeda menurut besarnya prestise dan atau kekayaan, dan atau kekuatan. Stratifikasi sosial (*social stratification*) atau pelapisan sosial menurut Murniatmo dan Wibowo (1983) merupakan kelompok manusia yang tinggal dalam kelompoknya (*group*) yang sama dan mempunyai kesamaan ciri-ciri kedudukan atau derajat, sehingga terjalin suatu hubungan intim di antara individu-individu sebagai anggota kelompok itu.

Kelas menurut Max Weber (1963) merupakan stratifikasi sosial berkenaan dengan hubungan produksi dan penguasaan harta benda. Bendix dan Seymour (1963) dalam Amaluddin (1987) menjelaskan bahwa kelas menurut Marx menunjuk kepada himpunan orang-orang yang memperagakan fungsi yang sama dalam organisasi produksi. Kelas-kelas dalam suatu masyarakat dibedakan antara satu dengan yang lainnya berdasarkan perbedaan posisi dalam tatanan ekonomi, yaitu perbedaan posisi dalam penguasaan alat-alat produksi.

Stratifikasi sosial pada hakekatnya adalah ketidaksamaan yang dilembagakan, tanpa peringkat tinggi lawan rendah, tidak ada stratifikasi. Perbedaan-perbedaan sosial tanpa peringkat bukanlah stratifikasi (Haviland, 1993). Schoorl (1981) menyatakan bahwa adanya modernisasi menyebabkan perubahan-perubahan besar dalam struktur hirarki dan dalam pengangkatan untuk posisi-posisi di dalam sistem yang berkaitan dengan gejala lain, yaitu stratifikasi sosial. Individu dalam

masyarakat mempunyai gengsi tertentu yang sangat ditentukan oleh kedudukan orang di dalam struktur pekerjaan.

Lapisan-lapisan masyarakat secara global sekali dapat dikatakan bahwa itu memang ada, karena anggota masyarakat yang satu menganggap bahwa anggota yang lain mempunyai gengsi yang berbeda. Ini hubungannya dengan perbedaan gaya hidup, cara berfikir, bahasa dan pakaian. Unsur-unsur yang mengikat suatu kelompok sosial bisa disebut sebagai pelapisan sosial, menurut **Murniatmo dan Wibowo (1983)**, disebabkan oleh adanya hal-hal sebagai berikut :

- 1). Kesamaan ciri-ciri dalam kelompok sosial
- 2). Kedudukan yang sama bagi anggota kelompok sosial
- 3). Terjadinya hubungan yang intim di antara individu-individu sebagai anggota kelompok

Sifat sistem berlapis-lapis dalam suatu masyarakat dapat bersifat tertutup (*closed social stratification*) dan ada yang bersifat terbuka (*open social stratification*). Sistem lapisan yang bersifat tertutup membatasi kemungkinan pindahnya seorang dari satu lapisan yang lain, baik yang merupakan gerak ke atas atau ke bawah. Jalan satu-satunya untuk masuk menjadi anggota dalam sistem yang demikian, dalam suatu lapisan masyarakat adalah kela hiran. Sistem yang terbuka terjadi sebaliknya, yaitu setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan, atau bagi yang tidak beruntung, untuk jatuh dari lapisan yang atas ke lapisan di bawahnya (**Soekanto, 1987**).

Murniatmo dan Wibowo (1983) menyatakan bahwa dalam setiap masyarakat terdapat pelapisan sosial. Masing-masing pelapisan sosial yang ada dalam masyarakat itu berbeda satu sama lain. Perbedaan itu disebabkan oleh "dasar" yang menyebabkan terjadinya pelapisan sosial yang ada dalam masyarakat itu "Dasar" yang menjadikan pelapisan sosial itu antara lain : 1). Pendidikan atau kemampuan pengetahuan 2). Kekayaan atau keadaan ekonomi 3). Jabatan atau kekuasaan 4). Keturunan kekerabatan 5). Unsur atau tingkat senioritas warga yang bersangkutan dan sebagainya Masyarakat yang berstratifikasi berlawanan tajam dengan masyarakat *egaliter*. Masyarakat pemburu dan peramu mempunyai ciri *egaliter*, meskipun ada beberapa pengecualian. Jumlah kedudukan yang berharga dalam masyarakat yang demikian sama banyaknya dengan jumlah orang yang dapat mendudukinya.

Dasar struktur kelas menurut **Haviland (1993)** adalah adanya keanekaragaman tugas. Setiap masyarakat pasti selalu ada tugas-tugas yang agak beragam, setidaknya berdasarkan perbedaan seks dan umur. Masyarakat *egaliter*, meskipun sudah ada orang yang mengerjakan tugas tertentu, hal itu tidak menghalang-halangi orang lain untuk mengerjakannya, sehingga pembagian tugas saja tidak cukup menyebabkan lahirnya stratifikasi. Lapisan sosial menurut **Sjamsidar dkk, (1989)**, secara sederhana terdiri dari lapisan bawah, lapisan menengah dan lapisan atas, dan tiada suatu masyarakat yang tidak memiliki pelapisan sosial.

Segala macam usaha akibatnya dilakukan untuk mendapatkan gelar tersebut, walaupun secara tidak halal. Marx mengikuti teori ekonomik klasik yang cukup ortodok, membedakan tiga kelas utama, masing-masingnya dicirikan dalam perannya

di dalam sistem produktif oleh “faktor produksi” yang dikendalikannya. Wujud kelas utama ini adalah para pemilik tanah oleh pemilikan atas modal, kaum kapitalis (“borjua”) oleh pemilikan atas modal, dan kaum proletar (kelas pekerja) oleh “pemilikan” atas kekuatan kerja (Worsley, 1992).

Faktor kapital memang merupakan kunci dalam terbentuknya kelas-kelas sosial kalau digunakan perspektif Marxis ini. Penguasaan kapital semakin besar, maka semakin besar kesempatan mobilitas ke kelas atas. Kelas sosialnya semakin ke atas, maka semakin besar pula kesempatan untuk mempengaruhi proses politik, kebijakan publik dan seterusnya (Satria, 2002).

“Kelas” merupakan salah satu istilah sentral dalam leksikon politik Barat, dan merupakan suatu istilah yang secara historis makna yang dilekatkan berhubungan erat dengan tujuan-tujuan politik suatu analisa. Marx mengungkapkan bahwa kelas secara tetap berkaitan dengan posisi kelompok yang berbeda-beda dalam hubungan produksi, yaitu cara kelompok-kelompok khusus terlibat dalam proses masyarakat memproduksi dirinya. Posisi dalam hubungan produksi ini bisa sebagai pemilik atau sebagai pengawas alat-alat produksi, sebagai produsen langsung, dan sebagai buruh upahan. Analisa Weberian menempatkan “kelas” (posisi ekonomi) berhadapan dengan “status” (distribusi kehormatan dan prestise) dan “kekuasaan politik” (Tanter dan Kenneth, 1989).

Marx menekankan betapa pentingnya faktor ekonomi dalam menentukan kehidupan sosial, terutama sekali Marx menekankan bahwa sistem ekonomi yang cenderung kapitalistlah yang telah menjadi sebab ketidakadilan dan kesenjangan struktur kelas-kelas dalam masyarakat (Sugihen, 1997). Kelas-kelas sosial yang

muncul dan apa yang menentukan hubungannya sangat erat kaitannya dengan konsep Marx mengenai materialisme historis.

Proses-proses sosial ini, yang disertai dengan perbedaan-perbedaan alamiah antara satu orang dengan orang lain, segera menimbulkan perbedaan-perbedaan dalam kepemilikan atau kontrol terhadap sumber-sumber alam serta alat-alat produksi. Marx menekankan jauh lebih keras daripada perbedaan antara orang secara biologis alamiah, hal ini merupakan dasar pokok untuk pembentukan kelas-kelas sosial yang berbeda. Kepemilikan atas kontrol atas alat produksi merupakan dasar utama bagi kelas-kelas sosial dalam semua tipe masyarakat, dari masyarakat bangsa primitif sampai kapitalisme modern (Johnson, 1988).

Pembentukan kelas dalam suatu masyarakat menurut Beteille *dalam* Amaluddin (1987), akan ditentukan sekurang-kurangnya oleh tiga faktor yang tidak selalu jelas kaitannya antara satu dengan lainnya, yaitu :

- 1). Kondisi ekonomis tertentu
- 2). Kesadaran masyarakat terhadap kondisi tersebut
- 3). Pengorganisasian secara politis terhadap kesadaran tersebut

Menurut Ossowski (1972) *dalam* Amaluddin (1987), keragaman penafsiran terhadap struktur kelas dapat disederhanakan menjadi dua model utama, yaitu model skema gradasi dan model skema hubungan ketergantungan. Pembagian kelas menurut model pertama dipandang sebagai suatu pembagian menurut derajat kualitas tertentu yang digunakan sebagai kriteria partisipasi kelas, misalnya menurut jumlah pendapatan.

Pembagian kelas pada model gradasi sintetik didasarkan atas kombinasi antara dua atau lebih kriteria objektif tertentu, misalnya berdasarkan kombinasi kriteria tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, nilai sewa rumah tinggal, dan peringkat pekerjaan. Masyarakat dibagi menjadi tiga lapisan, yaitu lapisan atas, lapisan menengah, dan lapisan bawah. Model skema hubungan ketergantungan menurut Ossowski (1972) dalam Amaluddin (1987) dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu model dikotomi dan model fungsional.

Model dikotomi menggambarkan pembagian masyarakat menjadi dua kelas yang didasarkan pada hubungan ketergantungan asimetris atau saling ketergantungan kepentingan-kepentingan antagonistik. Hubungan ini ditandai oleh adanya sifat-sifat yang saling berlawanan, misalnya : hubungan penguasa dengan yang dikuasai, pemilik dengan bukan pemilik, yang mengeksploitasi dengan yang dieksploitasi. Model fungsional menggambarkan pembagian kelas yang didasarkan pada hubungan saling ketergantungan secara organis. Hubungan ini ditandai oleh adanya perbedaan sifat tertentu tetapi tidak kontradiktif, seperti : konsepsi Adam Smith yang membagi masyarakat menjadi tiga golongan utama, yaitu golongan penyedia tanah, golongan kapitalis, dan golongan buruh.

Model dikotomi menurut Ossowski (1972) dalam Amaluddin (1987) dapat dibedakan menjadi dikotomi sederhana dan dikotomi kompleks. Model dikotomi sederhana merupakan model yang membagi masyarakat menjadi dua kelas yang saling berhubungan secara antagonistik, seperti kelas kapitalis dan kelas proletar. Model dikotomi kompleks merupakan model yang membagi masyarakat menjadi dua kelas dengan menyilangkan dua atau lebih pembagian dikotomi sederhana, misalnya konsepsi kaum Marxis klasik.

Kaum Marxis klasik ini membagi masyarakat kapitalis menjadi dua kelas dengan menyilangkan tiga macam pembagian dikotomi sebagai berikut :

- 1). Masyarakat yang memiliki alat-alat produksi dan yang tidak memiliki alat-alat produksi.
- 2). Masyarakat yang menguasai nilai lebih secara langsung dan yang menguasai nilai lebih secara tidak langsung.
- 3). Kaum miskin murni, yaitu kaum buruh dan kaum miskin yang menjadi pengusaha kecil tanpa menggunakan tenaga kerja upahan.

Manusia umumnya bercita-cita agar ada perbedaan kedudukan dan peranan dalam masyarakat. Cita-cita tersebut selalu akan tertumbuk pada suatu kenyataan yang berlainan. Setiap masyarakat harus menempatkan individu-individu pada tempat-tempat tertentu dalam struktur sosial dan mendorong untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai akibat penempatan tersebut. Masyarakat dengan demikian, menghadapi dua persoalan, yaitu menempatkan individu-individu tersebut dan mendorong agar melaksanakan kewajibannya, sehingga mau tidak mau ada sistem berlapis-lapis dalam masyarakat. Gejala tersebut sekaligus memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat. Pengisian tempat tersebut merupakan daya pendorong agar masyarakat bergerak sesuai dengan fungsinya. Wujud dalam setiap masyarakat juga berlainan, karena tergantung pada bentuk dan kebutuhan masing-masing masyarakat. Kedudukan dan peranan yang dianggap tertinggi oleh setiap masyarakat adalah kedudukan dan peranan yang dianggap terpenting serta memerlukan kemampuan dan latihan-latihan yang maksimal (Soekanto, 1987).

Konsepsi mengenai pelapisan sosial menurut orang Jawa dalam masyarakatnya, penduduk desa termasuk lapisan paling rendah, lapisan *wong cilik*, atau "orang kecil". *Wong cilik* di kota-kota adalah orang yang melakukan pekerjaan tangan dan pertukangan. Masyarakat yang menganggap dirinya masuk pada lapisan masyarakat yang lebih tinggi adalah golongan pegawai atau priyayi. Sebuah lapisan masyarakat Jawa yang lain adalah *wong* saudagar, atau pedagang-pedagang yang pada umumnya tinggal di kota-kota, walaupun ada pula yang tinggal di desa-desa. Lapisan tertinggi dalam masyarakat Jawa adalah orang bangsawan, yang terutama terdapat di Yogyakarta dan Surakarta, tetapi sesudah perang Dunia ke-II dan Zaman Revolusi sudah banyak kehilangan kekuasaan dan gengsinya (Koentjaraningrat, 1984).

Pembagian vertikal ke dalam *wong abangan* dan *santri* merupakan suatu pembagian lain dari masyarakat Jawa, berbeda daripada pembedaan menurut lapisan-lapisan. *Wong abangan* adalah orang-orang yang tidak amat mentaati pelajaran-pelajaran agama Islam terutama mengenai sholat lima kali sehari, berpuasa dalam bulan puasa dan makan daging babi. *Santri* adalah orang-orang yang taat menurut pelajaran Islam.

Perbedaan antara *abangan* dan *santri*, kecuali perbedaan lahir mengenai ketaatan kepada pelajaran-pelajaran agama Islam tersebut di atas, terletak juga pada hal-hal yang lebih mendalam, yaitu perbedaan dalam hal gaya hidup dan pandangan hidup. Orang *abangan* maupun orang *santri* terdapat dalam semua lapisan masyarakat orang Jawa, ada orang *abangan* yang *santri* di antara *wong cilik* di desa maupun di kota, ada orang *abangan* dan *santri* di antara orang priyayi, dan ada pula orang *abangan* dan *santri* di antara para bangsawan (Koentjaraningrat, 1984).

Orang-orang tersebut seringkali saling berbeda antara seorang dengan yang lain di dalam berbagai hal. bila kita mengamati orang-orang di dalam masyarakat dengan cermat. Perbedaan yang jelas dapat dilihat di antara orang-orang yang lalu lalang di pasar atau kota-kota besar. Perbedaan itu mencakup perbedaan fisik (biologis), perilaku (tingkah laku), gaya hidup, cara berpakaian, perhatian atau minat. Perbedaan yang diamati, bila pergi ke desa-desa atau pasar pedesaan, mungkin tidak begitu besar sebagaimana terlihat di kota. Perbedaan dan atau persamaan yang dapat diamati tersebut, umumnya berhubungan erat dengan perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan alamiah tempat hidup. Semua perilaku masyarakat merefleksikan semua pengaruh lingkungan masyarakat tersebut (Sugihen, 1995).

Penggolongan sosial dalam masyarakat nelayan menurut Kusnadi (2002), pada dasarnya dapat ditinjau dari tiga sudut pandang. *Pertama*, dari segi penguasaan alat produksi atau peralatan tangkap (perahu, jaring dan perlengkapan yang lain), struktur masyarakat nelayan terbagi dalam kategori nelayan pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh. Nelayan buruh tidak memiliki alat-alat produksi dan dalam kegiatan sebuah unit perahu, nelayan buruh hanya menyumbangkan jasa tenaganya dengan memperoleh hak-hak yang sangat terbatas. *Kedua*, ditinjau dari tingkat skala investasi modal usahanya, struktur masyarakat nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan besar dan nelayan kecil. Nelayan, disebut sebagai nelayan besar karena jumlah modal yang diinvestasikan dalam usaha perikanan relatif banyak, sedangkan pada nelayan kecil justru sebaliknya. *Ketiga*, dipandang dari tingkat teknologi peralatan tangkap yang digunakan, masyarakat nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan modern dan nelayan tradisional. Nelayan-nelayan modern

menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dibandingkan dengan nelayan tradisional.

Salah satu kunci pembeda adalah antara model produksi kapitalis dengan model produksi non-kapitalis. Produsen pada saat ini merupakan bentuk terpisah dari pemilikan alat produksi. Produsen pada model non-kapitalis seperti seorang petani yang memiliki beberapa alat produksi tetapi dipengaruhi oleh non-produsen, seperti seorang tuan tanah yang mendapatkan keuntungan ekonomi dari produsen dengan cara penggunaan kekuatan politik, militer atau ideologi (Jary dan Julia, 1991).

Manusia memiliki sifat sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk berketuhanan. Manusia sebagai makhluk sosial dituntut untuk berhubungan sosial antar sesama dalam kehidupan, di samping tuntutan untuk hidup berkelompok. Dasar hubungan tersebut yaitu ada kesadaran saling mengenal, saling mengakui, dan saling berbuat. Kelompok sosial merupakan suatu kesatuan sosial yang terdiri atas dua atau lebih individu yang saling berinteraksi sosial secara intensif dan teratur sehingga di antara individu tersebut terjadi pembagian tugas, struktur, dan norma-norma tertentu (Santoso dalam Andriyan, 2005).

Resiko pekerjaan yang relatif besar menyebabkan masyarakat nelayan memiliki karakter keras, tegas, dan terbuka (Satria dalam Andriyan, 2005). Menurut Purwanti (1994), berdasarkan status hubungan kerja dan pemilikan modal, nelayan dibedakan :

a. Nelayan pemilik alat produksi (perahu dan alat tangkap) yang tidak ikut melaut.

Nelayan ini disebut dengan juragan darat. Juragan darat umumnya memiliki

pekerjaan lain diluar bidang perikanan, seperti sopir, guru, aparat desa, dan pedagang pengumpul ikan.

- b. Nelayan pemilik alat produksi yang ikut melaut, nelayan ini disebut dengan juragan laut.
- c. Buruh nelayan, yaitu nelayan yang tidak memiliki perahu. Nelayan ini hanya mengandalkan tenaga dan keterampilannya dalam operasi penangkapan ikan dilaut.

Kendala yang bersifat sosial budaya timbul apabila terdapat kesempatan bagi buruh nelayan untuk mendapat kredit, tetapi nelayan cenderung kurang dapat mengembangkannya. Jalan keluar untuk mengurangi kemiskinan nelayan tidak hanya sekedar memberikan kredit dan berbagai fasilitas, tetapi perlu diketahui struktur yang menyebabkan nelayan terus bergantung kepada pihak yang mengeksploitasinya (Purwanto dalam Andriyan, 2005).

Pola hubungan kerja di antara unit alat tangkap akan menentukan pola bagi hasil. Pola bagi hasil ini akan menentukan tingkat pendapatan nelayan, baik nelayan juragan maupun pandega (Susilo dkk dalam Purwanti, 1994). Hasil penerimaan bersih dalam sistem bagi hasil, dibagi menjadi dua yaitu 50% untuk pemilik perahu dan 50% bagian pandega. Bagi hasil ini diperoleh dari penerimaan kotor yang telah dikurangi dengan retribusi, biaya operasi dan perawatan mesin. Bagian pandega 50% dibagi lagi sesuai dengan jumlah anak buah kapal yang turut melaut, sehingga penerimaan pandega tergantung dari jumlah tenaga kerja yang digunakan. Penerimaan yang diperoleh pandega pada satu unit alat tangkap akan semakin kecil

jika tenaga kerja yang bekerja semakin banyak. Bagian pandega ini tetap 50%, berapapun jumlah pandega yang bekerja (**Hariati dkk dalam Purwanti, 1994**).

Menurut **Andriyan (2005)**, nelayan pemilik memperoleh bagian lebih besar daripada nelayan buruh dalam sistem bagi hasil. Bagi hasil ini berlaku pada setiap tingkat skala usaha penangkapan, bahkan dalam unit penangkapan modern, tingkat kesenjangan perolehan pendapatan antara nelayan pemilik dengan nelayan buruh sangat besar. Tingkat pendapatan yang diperoleh nelayan buruh semakin kecil karena biaya operasi dan pemeliharaan peralatan tangkap cukup besar.

Pola pemilikan kelompok dan pola pemilikan individu terhadap sarana penangkapan ikan mempunyai pengaruh besar pada pendapatan nelayan. Pola pemilikan individu terhadap sarana produksi tersebut secara singkat dapat dikatakan dapat mendorong terjadinya ketimpangan pendapatan di antara nelayan. Pemilikan kelompok lebih mendorong terjadinya pemerataan pendapatan. Ketimpangan pembagian pendapatan ataupun pemerataan pendapatan pada prinsipnya berpangkal pada sistem bagi hasil yang mentradisi di kalangan nelayan (**Masyhuri, 2000**).